

## **MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KB BAITAL HAMDI SAMPANG**

**<sup>1</sup>Moh Khorofi, Ega <sup>2</sup>Bandawa Winata**  
12Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang  
Email: [1mkhorofi199@gmail.com](mailto:mkhorofi199@gmail.com), [2ebwinata@gmail.com](mailto:ebwinata@gmail.com)

**Abstrak:** Pendidikan anak usia dini (PAUD) bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi anak agar mereka dapat berfungsi sebagai manusia yang utuh sesuai dengan budaya dan falsafah bangsanya. KB Baital Hamdi Sampang adalah lembaga yang didirikan untuk menyediakan sumber daya manusia berkualitas. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan meningkatkan kualitas negara. Oleh karena itu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia tak terlepas dari pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di KB Baital Hamdi Sampang melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan terkait penyusunan rencana anggaran belanja. Ini dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tahapan analisis permasalahan, potensi, dan kepentingan masyarakat. Masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan biaya modal maupun operasional dengan cara hadir dalam pertemuan wali murid, rapat panitia pembangunan gedung KB Baital Hamdi Sampang, serta pertemuan lainnya di wilayah tersebut.

**Kata Kunci:** Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Masyarakat, Mutu Pendidikan PAUD

### **Pendahuluan**

Program pendidikan anak usia dini adalah bagi anak usia 0-6 tahun, masa yang sangat menentukan dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka untuk kehidupan selanjutnya. Anak usia dini juga sering disebut sebagai anak pra-sekolah. Program ini mencakup pendidikan dari lahir hingga usia 6 tahun, memberikan kesempatan yang sama kepada anak laki-laki maupun perempuan untuk berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.<sup>1</sup>

Pendidikan anak usia dini (PAUD) bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi anak sehingga mereka dapat tumbuh menjadi manusia yang utuh sesuai

---

<sup>1</sup> Suharni, Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini Pada PAUD Bintang Rabbani Pekanbaru, "*Jurnal Ilmiah Potensia*", Vol. 4, No. 1, (2019), 1-5.

dengan kultur, budaya, dan falsafah suatu bangsa.<sup>2</sup> KB Baital Hamdi dipersiapkan sebagai lembaga yang menyediakan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan kualitas suatu negara, sehingga upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak bisa dipisahkan dari pendidikan.

Pendidikan yang berkualitas dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari sisi *input*, *proses*, *output*, maupun *outcome*. Input pendidikan yang berkualitas mencakup guru-guru berkualitas, peserta didik berkualitas, kurikulum berkualitas, fasilitas berkualitas, dan berbagai aspek penyelenggara pendidikan yang berkualitas. Proses pendidikan yang berkualitas meliputi proses pembelajaran yang berkualitas.<sup>3</sup>

Output pendidikan yang berkualitas adalah lulusan yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan, sementara *outcome* pendidikan yang berkualitas adalah lulusan yang mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau terserap dalam dunia usaha atau industri. Pembiayaan pendidikan merupakan aktivitas yang berkaitan dengan perolehan dana (pendapatan) dan penggunaannya untuk membiayai seluruh program pendidikan yang telah ditetapkan.<sup>4</sup>

Pendapatan atau sumber dana pendidikan yang diterima oleh sekolah berasal dari APBN, APBD, serta sumbangan dari masyarakat atau orang tua siswa. Untuk mencapai kualitas pendidikan yang baik, manajemen pembiayaan pendidikan harus dikelola secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan tahapan-tahapan dalam manajemen pembiayaan pendidikan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan.<sup>5</sup>

Indonesia merupakan negara hukum di mana pendidikan memiliki standar nasional yang menjadi acuan dalam pembentukan lembaga pendidikan yang berkualitas. Salah satunya adalah standar pembiayaan.<sup>6</sup> Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48, pengelolaan dan pembiayaan pendidikan harus didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan, akuntabilitas, dan transparansi. Prinsip-

---

<sup>2</sup> Bayu Suratman, Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan di PAUD IT Alhamdulillah Yogyakarta, "*Atta'dib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*", Vol. 1, No. 1, (2020),

<sup>3</sup> Ahmad Sulaiman dan Udik Budi Widodo, Implementasi System Penjamin Mutu Internal Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Di Universitas Gadjah Mada, "*Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*", Vol. 4, No. 1, (2016).

<sup>4</sup> Anne Sarmono, Achmad Supriyanto, dan Agus Timan. Penerapan Manajemen Mutu Terpadu Pada Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Internal, "*JAMP: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*", Vol. 3, No. 1, (2020), 38.

<sup>5</sup> Opan Arifudin et al., *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), hlm, 55.

<sup>6</sup> Sunhaji, The Impementation of Integrated Learning in The Islamic Religious Education to Raise The Faith Devotion of The Students of State Seniour High Schools in Purwokerto, "*Dewantara*", Vol. 1, No. 1, (2013).

prinsip ini harus dijalankan dan menjadi perhatian utama bagi semua pihak yang terlibat dalam lembaga pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen pembiayaan di setiap lembaga pendidikan sesuai dengan visi Pendidikan Nasional.<sup>7</sup>

Kebijakan paudisasi desa melalui Program 1 Desa 1 PAUD, yang diperkenalkan pada tahun 2012 sebagai langkah untuk memperluas dan menyebarkan akses PAUD guna meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), telah terbukti berhasil dalam mempercepat pertumbuhan PAUD di seluruh negeri (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018). Ini terbukti dari peningkatan jumlah satuan pendidikan baik formal maupun nonformal di wilayah perkotaan maupun pedesaan, seperti Taman Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (KB), Bustanul Athfal (BA), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah satuan pendidikan di berbagai jenjang dalam beberapa tahun terakhir.<sup>8</sup>

Meskipun berhasil dalam meningkatkan jumlah satuan pendidikan untuk meningkatkan APK PAUD seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tampaknya masih ada banyak masalah mendasar yang perlu diatasi. Salah satu masalah yang muncul adalah kurangnya kualitas yang belum sesuai dengan harapan. Artinya, kesuksesan dalam meningkatkan jumlah tersebut belum tentu berdampak langsung pada peningkatan kualitas. Bahkan, sampai saat ini, kualitas PAUD masih menjadi masalah yang belum terselesaikan sepenuhnya, bersama dengan masalah-masalah pendidikan lainnya. Dengan kata lain, masih terdapat ketimpangan antara pemerataan akses dan peningkatan kualitas, yang membutuhkan komitmen serius dari berbagai pihak untuk mengatasinya.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah kualitas pendidikan yang terjadi. Salah satu langkah yang dianggap fundamental dan strategis adalah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sebagai penjabaran dan turunan dari peraturan pemerintah tersebut, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah diterbitkan secara teknis operasional. Peraturan ini mencakup Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini (STPPA), standar isi, standar proses, standar penilaian, standar

---

<sup>7</sup> Ida Rindaningsih, Pengembangan Model Manajemen Strategi Berbasis (Beyond Center And Circle Time) BCCT Pada PAUD, *"Pedagogia: Jurnal Pendidikan"*, Vol. 1, No. 2, (2012), 42.

<sup>8</sup> Trias Aprilyani dan Qosim Khoiri Anwar, Manajemen Berbasis Masyarakat Dalam Pengelolaan PAUD, *"Journal of Nusantara Education"*. Vol. 1, No. 1, (2021), 5.

pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, serta standar pembiayaan. Di dalam peraturan tersebut, berbagai karakteristik yang merupakan standar minimum yang harus dipenuhi oleh semua satuan PAUD, baik yang beroperasi dalam jalur formal maupun nonformal, telah dijelaskan secara rinci.

Meskipun kebijakan ini bersifat mengikat, yang memaksa semua lembaga layanan pendidikan di Indonesia untuk berupaya menyesuaikan diri dengan standar mutu yang telah ditetapkan, namun secara umum belum mencapai hasil yang diharapkan. Bahkan, masih terdapat indikasi bahwa kesenjangan antara kuantitas dan kualitas pendidikan masih ada.<sup>9</sup> Ini berarti bahwa setiap satuan pendidikan pada tingkat ini masih perlu melakukan langkah-langkah konkret agar dapat memberikan layanan pendidikan sesuai dengan kriteria minimum yang diatur dalam peraturan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pedoman sebagai panduan dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah pedoman terkait pembiayaan pendidikan.

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan menjadi faktor kunci dan tidak terpisahkan dalam manajemen pendidikan. Menurut Supriyono, biaya adalah pengorbanan ekonomis yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa. Secara sederhana, biaya (cost) dapat diartikan sebagai pengeluaran. Dalam konteks ekonomi, biaya pengeluaran tersebut dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya.<sup>10</sup>

Standar pembiayaan pendidikan adalah biaya minimum yang diperlukan oleh sebuah satuan pendidikan untuk menjalankan kegiatan pendidikan selama satu tahun. Biaya ini mencakup biaya investasi dan biaya operasional. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas), diatur biaya minimum yang harus dialokasikan untuk setiap satuan pendidikan dan setiap jalur pendidikan, baik jalur umum maupun jalur berkebutuhan khusus. Undang-Undang juga merinci berapa biaya yang harus ditanggung oleh setiap peserta didik selama satu tahun agar proses belajar dapat berjalan. Selain itu, Permendiknas juga mengatur standar biaya non-personalia, yang meliputi biaya operasional non-personalia seperti biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi atau perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa atau kegiatan ekstrakurikuler,

---

<sup>9</sup> Kholid Mawardi, *Insan Kamil Sebagai Basis Pengembangan Kreativitas Dalam Pendidikan Islam*, "Insania: Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan", Vol. 18, No. 1, (2013): 37–48.

<sup>10</sup> Nelly Nelly, *Manajemen Finansial Lembaga Pendidikan Islam (Studi Tentang Optimalisasi Anggaran Pembiayaan)*, "Hikmah", Vol. 18, No. 1. (2021): 28–40.

biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan.<sup>11</sup> Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), atau yang biasa disebut Standar PAUD, merupakan kriteria mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasim Budimansyah menegaskan bahwa salah satu langkah konkret untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan adalah dengan memperkuat partisipasi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengakomodasi pandangan, aspirasi, serta menggali potensi masyarakat untuk memastikan adanya demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga pendidikan.<sup>12</sup> Partisipasi masyarakat dianggap penting karena merupakan salah satu manifestasi dari esensi demokrasi yang adil. Ini berarti bahwa tidak hanya masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam penyediaan dan pengelolaan pendidikan. Ini mencakup kontribusi dalam penyediaan dana, pengembangan, dan pemeliharaan fasilitas pendidikan, serta memberikan keahlian dan kepakaran yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan.

Dalam perspektif ini, sekolah dianggap sebagai pusat kehidupan masyarakat yang harus dirancang untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa. Optimalisasi sumber daya yang terkait dengan pemberdayaan sekolah dianggap sebagai solusi terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Pemberdayaan ini bertujuan untuk memberikan kemandirian yang lebih besar kepada sekolah dalam menangani berbagai masalah yang dihadapinya. Lebih jauh lagi, pemberdayaan sekolah ini memiliki implikasi yang signifikan ke depannya, mengingat kompleksitas kehidupan sosial masyarakat yang terus berkembang. Semakin tinggi tingkat sosial dan kompleksitas kehidupan, semakin tinggi pula harapan dan tuntutan yang diletakkan pada pendidikan. Masyarakat percaya bahwa pendidikan dan sekolah memiliki peran kunci dalam menjawab serta mengantisipasi berbagai tantangan yang dihadapi.

Kemampuan lembaga pendidikan untuk memperoleh kepercayaan tinggi dari masyarakat merupakan hal yang sangat penting, karena kepercayaan yang tinggi ini dapat berdampak positif pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan kualitas lembaga pendidikan. Hal ini sejalan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Bryte dan Schneider, seperti yang dikutip oleh Tony

---

<sup>11</sup> Rida Fironika, *Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia*, "Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar", Vol. 2, No. 1. (2015): 43-64.

<sup>12</sup> Arwildayanto, Nina Lamatenggo, and Warni Tune Sumar, *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Widya Padjajaran, 2017).

Gelsthorpe dan John West-Burnham, bahwa lembaga pendidikan yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat memiliki satu dari dua kesempatan untuk membuat perbaikan yang signifikan, sementara lembaga pendidikan dengan tingkat kepercayaan yang rendah hanya memiliki satu dari tujuh kesempatan untuk memperbaiki diri.<sup>13</sup>

Peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan memiliki posisi yang sangat penting dan strategis, yang diakui secara resmi baik dalam Undang-Undang maupun beberapa peraturan Menteri. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, pendidikan dianggap sebagai tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pada tingkat yang lebih luas, masyarakat juga memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, sementara pemerintah bertanggung jawab secara makro terhadap pendidikan bagi seluruh warga negaranya.<sup>14</sup>

Peran serta masyarakat juga merupakan bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan manajemen pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menggalang partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan, selain upaya untuk menjalankan aspek-aspek lain dalam manajemen pembiayaan. Masyarakat merupakan lingkungan yang menjadi pondasi bagi sekolah; semua siswa berasal dari masyarakat sekitar, dan masyarakat berada di sekitar sekolah sepanjang waktu. Selain itu, masyarakat juga merupakan salah satu sumber pemasukan keuangan bagi pemerintah, sehingga memiliki peran penting dalam pembangunan, termasuk dalam pembiayaan pendidikan.

Sulistyorini menekankan bahwa untuk mencapai pendidikan berkualitas, diperlukan manajemen sumber daya yang komprehensif dan profesional di dalam lembaga pendidikan. Salah satu aspek penting yang harus dikelola dengan baik untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas adalah masalah keuangan atau pembiayaan. Menurutnya, keuangan atau pembiayaan merupakan sumber dana yang esensial bagi setiap lembaga pendidikan, digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran, peningkatan kesejahteraan guru, penyediaan layanan, pelaksanaan program supervisi, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya. Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan dianggap sebagai elemen vital dalam mencapai pendidikan yang berkualitas di lembaga pendidikan, termasuk di KB Baital Hamdi Sampang. Kegiatan pendidikan yang berkualitas memerlukan penanganan finansial

---

<sup>13</sup> Rachmat Agumdhana dan Suwardji, "Faktor Sosial Ekonomi Masyarakat Dan Lingkungan Yang Berperan Dalam Agrowisata", *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, Vol, 5. No. 2, (2022).

<sup>14</sup> Sonedi, Zulfa Jamalie, dan Majeri, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber Dari Masyarakat, *"Fenomena"*, Vol 9, No. 1, (2017): 25–46.

yang memadai, yang erat kaitannya dengan keberadaan sumber pendanaan atau pembiayaan pendidikan yang kokoh.

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa KB Baital Hamdi Sampang telah melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di KB Baital Hamdi Sampang.

### **Metode**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi kualitatif. Sesuai dengan pendapat Moleong, penelitian kualitatif dijelaskan sebagai penelitian yang menghasilkan temuan berupa data dalam bentuk kata-kata, baik yang tertulis maupun lisan, dan berasal dari subjek dan objek yang sedang diteliti.<sup>15</sup> Peneliti umumnya menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Strategi penelitian ini, yang dikenal sebagai deskriptif ekologi, bertujuan untuk menggambarkan berbagai fenomena dan peristiwa dalam lingkungan alamiah dan buatan.<sup>16</sup>

Data dikumpulkan melalui observasi di KB Baital Hamdi Sampang serta wawancara dengan guru KB Baital Hamdi, yaitu Hilfi Nahdotillah, Risma Faraodiba, dan Novia. Selain itu, sumber data sekunder yang digunakan meliputi bahan literatur seperti buku, tesis, jurnal, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan manajemen pembiayaan pendidikan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Manajemen Pembiayaan Pendidikan di KB Baital Hamdi**

#### **Sampang**

Berdasarkan hasil analisis data dari kegiatan wawancara dan studi dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa KB Baital Hamdi Sampang secara faktual merupakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini berbasis masyarakat. Terdapat beberapa argumen yang mendukung pandangan ini. Pertama, berdasarkan hasil penelusuran mengenai riwayat pendiriannya, didapati bahwa pendirian satuan pendidikan tersebut sepenuhnya digagas dan diprakarsai oleh para tokoh yang tergabung dalam Yayasan Pendidikan Islam Baitul Hamdi, dengan dukungan dari warga masyarakat setempat. Artinya, satuan pendidikan ini merupakan produk dari aspirasi

---

<sup>15</sup> M. Askari Zakariah, Vivi Afriani, and KH. M. Zakariah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Action Research, Research and Development (R and D)* (Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warrahmah, 2020), hlm. 43.

<sup>16</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejal, 2018), hlm. 62.

masyarakat. Hal ini mencerminkan salah satu ciri utama pendidikan berbasis masyarakat dalam konteks pendidikan nasional, yaitu pendidikan yang dikelola oleh entitas swasta atau yayasan yang berasal dari masyarakat itu sendiri.

Kedua, proses kegiatan pendidikan tersebut didukung oleh partisipasi aktif masyarakat lokal dan selalu memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia di lingkungannya. Dengan demikian, lembaga-lembaga pendidikan tersebut tidak hanya lahir dari masyarakat, tetapi juga dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Ketiga, tujuan utama pendirian lembaga-lembaga ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan warga masyarakat, khususnya mereka yang menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan usia dini akibat kendala geografis, ekonomi, dan lainnya. Ini menunjukkan bahwa institusi pendidikan ini diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat setempat. Keempat, pengelolaan lembaga dilakukan secara demokratis dengan melibatkan partisipasi aktif dari warga lokal. Dengan demikian, dalam pengelolaannya, peran masyarakat sangatlah signifikan. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan untuk menyimpulkan bahwa di sini terjadi implementasi yang kuat dari konsep manajemen pendidikan berbasis masyarakat. Ini sesuai dengan pandangan Winarno Surahmad bahwa pendidikan berbasis masyarakat adalah model penyelenggaraan pendidikan yang berasal dari, dikelola oleh, dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

Pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis masyarakat di sini secara praktis tercermin melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam semua aspek pengelolaan pendidikan, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, hingga pengawasan. Partisipasi masyarakat dalam proses ini termanifestasi melalui berbagai cara, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan, kontribusi dalam penyediaan sumber daya yang dikenal dengan 5 M (manusia, materi, mesin, metode, dan uang). Selain itu, masyarakat seringkali juga berperan sebagai pendamping dan pelaksana kegiatan, serta bertindak sebagai pengawas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap penggunaan sumber daya pendidikan.

Terkait dengan manajemen mutu, terlihat jelas adanya keterlibatan aktif masyarakat yang merupakan esensi dari pendidikan berbasis masyarakat. Bahkan, partisipasi masyarakat dapat disebut sebagai pendekatan utama dalam menjalankan penjaminan mutu di KB Baital Hamdi Sampang. Potensi lokal digali secara optimal untuk memenuhi delapan standar nasional sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, yang mencakup Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini (STPPA), standar isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan, sarana dan prasarana, serta

pembiayaan. Pendekatan ini sesuai dengan panduan penjaminan mutu pendidikan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 28 tahun 2016 yang menegaskan bahwa penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melebihi Standar Nasional Pendidikan. Guru memegang peranan sentral dalam berbagai interaksi pembelajaran.

Secara lebih terperinci, optimalisasi keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penjaminan mutu dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, keterlibatan partisipasi masyarakat dalam mencapai Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini (STPPA) merupakan fakta yang tak terbantahkan. Ini menandakan bahwa peran masyarakat sangat signifikan, dominan, dan menentukan dalam memastikan mutu pendidikan sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam STPPA yang telah ditetapkan. Secara konkret, contohnya dapat dilihat ketika melaksanakan kegiatan untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan peserta didik sebagaimana yang diamanatkan dalam Standar PAUD. Standar ini mencakup integrasi aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni, serta perubahan perilaku yang berkesinambungan dan terintegrasi dari faktor genetik dan lingkungan, yang meningkat secara individual baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pendekatan ini sejalan dengan semangat Standar PAUD yang menekankan bahwa pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal memerlukan keterlibatan orang tua dan orang dewasa, serta akses terhadap layanan PAUD yang berkualitas.

Kedua, keterlibatan masyarakat dalam pemenuhan standar isi tercermin saat pengembangan kurikulum. Dalam KB Baital Hamdi Sampang, kurikulum didesain oleh tim pengembang yang dibentuk oleh satuan pendidikan, dengan merujuk pada standar yang berlaku. Kurikulum ini mencakup program pengembangan yang disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan anak, dan budaya lokal. Semua materi kurikulum dirumuskan secara sistematis dan diwujudkan dalam dokumen tertulis yang dievaluasi dan ditinjau secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di tingkat lokal, nasional, dan global. Evaluasi ini menjadi dasar pengembangan kurikulum, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan pengguna layanan, termasuk masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan. Masyarakat memberikan masukan dalam proses perumusan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum, terutama terkait dengan kompetensi dan perilaku yang diperlukan peserta didik untuk menghadapi tantangan kehidupan saat ini dan di masa depan.

Ketiga, tidak bisa disangkal bahwa keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan standar proses merupakan kenyataan. Hal ini mengubah persepsi yang

beredar bahwa proses pembelajaran semata-mata menjadi tanggung jawab para pendidik. Dalam konteks manajemen pendidikan era desentralisasi, di mana konsep manajemen berbasis sekolah diterapkan, terbuka kesempatan bagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan secara menyeluruh. Dalam upaya memastikan keterlaksanaan sesuai dengan standar proses yang diatur dalam standar nasional PAUD, masyarakat memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan proses pembelajaran di KB Baital Hamdi Sampang tanpa harus mengintervensi otoritas para pendidik.

Dalam konteks implementasi manajemen pendidikan berbasis masyarakat untuk penjaminan mutu PAUD, penting untuk mengangkat pelibatan partisipasi masyarakat sebagai instrumen dalam pengelolaan pendidikan yang demokratis. Pendekatan ini sejalan dengan visi bahwa partisipasi masyarakat menciptakan lingkungan pendidikan yang terbuka dan demokratis, di mana seluruh anggota komunitas sekolah, termasuk guru, siswa, karyawan, serta masyarakat umum seperti orang tua, tokoh masyarakat, ilmuwan, dan usahawan, didorong untuk terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dengan demikian, implementasi pendidikan berbasis masyarakat dijadikan sebagai pendekatan utama dalam penjaminan mutu di KB Baital Hamdi Sampang. Artinya, partisipasi masyarakat menjadi modal utama, bahkan bisa dikatakan sebagai elemen kunci, dalam mencapai target dan aspirasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pendekatan ini sangat realistis mengingat adanya keterbatasan kemampuan pemerintah dan yayasan pendidikan sebagai pihak yang bertanggung jawab utama dalam menyediakan berbagai sumber daya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pendekatan berbasis masyarakat ini dapat menjadi solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan peningkatan mutu yang selama ini dianggap sebagai tantangan utama dalam pembangunan sektor pendidikan secara nasional.

Selain itu, pola manajerial yang diterapkan di KB Baital Hamdi Sampang juga dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong optimalisasi pelibatan partisipasi masyarakat. Paling tidak, terdapat dua strategi yang dijalankan oleh pihak manajemen. Pertama, penerapan budaya transparansi dalam pengelolaan sumber daya pendidikan. Dalam hal ini, manajemen selalu membuka akses sebanyak mungkin kepada para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi, memberikan masukan, mengawasi seluruh proses pencarian, pengumpulan, pengawasan, dan pemanfaatan sumber daya pendidikan. Masyarakat turut serta dalam pengambilan keputusan strategis dan melakukan kontrol untuk mencegah penyimpangan. Dalam pengelolaan sumber daya pendidikan, masyarakat diposisikan sebagai subjek yang aktif. Pendekatan ini sesuai dengan konsep yang

menekankan bahwa pendidikan harus memberdayakan dan memberikan kesempatan serta kebebasan kepada masyarakat untuk merancang, merencanakan, membiayai, mengelola, dan menilai apa yang diperlukan oleh masyarakat itu sendiri.

## **B. Peran Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan di KB Baital**

### **Hamdi Sampang**

Deskripsi hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di KB Baital Hamdi Sampang merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Secara umum, partisipasi masyarakat dapat dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu: pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan; kedua, partisipasi dalam pelaksanaan dan penikmatan manfaat; dan ketiga, partisipasi dalam evaluasi.

Berkaitan dengan tahapan dalam pembiayaan pendidikan, Mulyasa menyatakan bahwa prosesnya meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahapan-tahapan ini saling terkait satu sama lain, membentuk rangkaian proses yang utuh dalam manajemen pembiayaan pendidikan.

Kedua teori, baik yang diajukan oleh Cohen dan Uphoff mengenai pengelompokan partisipasi masyarakat maupun yang disampaikan oleh Mulyasa mengenai tahapan dalam pembiayaan pendidikan, memiliki keselarasan. Partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, sesuai dengan konsep yang dinyatakan dalam kedua teori tersebut.<sup>17</sup> Untuk itu, ketiga tahapan dalam pembiayaan pendidikan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, yang melibatkan partisipasi masyarakat, sesuai dengan tujuan penelitian ini. Alur ini akan digunakan dalam penyajian deskripsi hasil temuan penelitian, yang bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap pembiayaan pendidikan di KB Baital Hamdi Sampang.

Dari hasil wawancara dengan Hilfi Nahdotillah, bendahara KB Baital Hamdi Sampang, didapatkan informasi bahwa pembiayaan di KB Baital Hamdi Sampang secara umum mencakup tiga aspek. Pertama, pembiayaan operasional, yang mencakup pembayaran gaji guru dan pendamping, serta pembiayaan untuk kebutuhan pembelajaran seperti fotokopi materi dan pembelian ATK. Kedua, pembiayaan untuk penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran, yang dalam

---

<sup>17</sup> E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep Upaya Dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 61.

penelitian ini difokuskan pada pembiayaan pembangunan gedung KB Baital Hamdi Sampang. Ketiga, pembiayaan untuk kegiatan yang bersifat terprogram dan partisipatif. Kegiatan terprogram merujuk pada kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara rutin, seperti hafalah akhir as-sanah di KB Baital Hamdi Sampang yang menjadi fokus penelitian. Sementara itu, kegiatan partisipatif adalah kegiatan di mana KB Baital Hamdi Sampang ikut serta dalam acara yang diadakan oleh pihak luar, seperti pawai ta'aruf yang diadakan rutin setiap tahun.

Dalam lingkup penelitian ini, jenis pembiayaan yang akan dieksplorasi adalah biaya modal (*capital cost*) dan biaya berulang (*recurrent cost*). Kedua jenis pembiayaan tersebut, saat diterapkan pada konteks KB Baital Hamdi Sampang, menunjukkan kesesuaian yang jelas. Pembiayaan untuk pembangunan gedung KB Baital Hamdi Sampang termasuk dalam kategori biaya modal, sementara pembiayaan untuk operasional KB Baital Hamdi Sampang (termasuk pembayaran gaji guru dan pendamping, serta biaya untuk kebutuhan pembelajaran) masuk dalam kategori biaya berulang. Selain itu, terdapat juga pembiayaan untuk kegiatan partisipatif dan terprogram, yang juga menjadi fokus dalam penelitian ini. Berikut adalah deskripsi hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di KB Baital Hamdi Sampang, dengan sub-topik meliputi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembiayaan Operasional KB Baital Hamdi Sampang.

Dalam pelaksanaan pembiayaan operasional KB Baital Hamdi Sampang, Hilfi Nahdotillah menjelaskan bahwa, sesuai dengan perencanaannya, terbagi menjadi dua aspek utama. Pertama adalah pelaksanaan pembayaran gaji guru dan pendamping, serta penggunaan atau pembelanjaan infak siswa. Secara khusus, pembayaran gaji guru dan pendamping diawali dengan penarikan SPP dari para siswa.

Dalam konteks sumber pembiayaan untuk gaji guru dan pendamping, selain dari kontribusi wali siswa yang merupakan sumber pembiayaan utama, Risma Faraodiba menjelaskan bahwa terdapat sumber pembiayaan lain yang berperan. Menurut penjelasannya, pengurus KB Baital Hamdi Sampang juga turut serta dalam pembiayaan khusus untuk gaji guru dan pendamping.

Setiap bulan, para pengurus KB Baital Hamdi Sampang menyisihkan sebagian dari harta pribadi mereka untuk membantu memenuhi pembiayaan gaji guru dan pendamping. Namun, besaran nominal yang disisihkan tidak ditentukan secara kaku, melainkan bergantung pada kesediaan masing-masing individu. Tindakan ini secara signifikan meningkatkan ketersediaan dana setiap bulan untuk pembayaran gaji guru dan pendamping. Selain itu, ada juga warga yang tidak memiliki keterkaitan

langsung dengan KB Baital Hamdi Sampang namun turut serta memberikan bantuan atau menjadi donatur untuk membantu pembayaran gaji guru dan pendamping.

Risma Faraodiba menjelaskan bahwa mekanisme pembayaran SPP oleh wali siswa kepada pihak KB dilakukan saat pertemuan wali siswa bulanan. Proses pembayaran SPP ini berlangsung setelah rangkaian acara pertemuan selesai, tepatnya setelah sesi penutupan dan dilanjutkan dengan berjabat tangan antara pengurus, guru, pendamping, dan wali siswa. Setelah proses jabat tangan selesai, setiap wali kelas (guru) didampingi oleh pendampingnya, menempati posisinya masing-masing di meja yang telah disiapkan. Kemudian, para wali siswa berkumpul atau mendekat sesuai dengan wali kelas putra-putri mereka, dan pada saat itu, mereka menyampaikan pembayaran SPP bagi putra-putri mereka dengan menyerahkan kartu SPP yang sebelumnya telah diberikan oleh pihak KB melalui putra-putri mereka.

Risma Faraodiba juga menambahkan bahwa pertemuan wali siswa merupakan kesempatan bagi pihak KB Baital Hamdi Sampang untuk mengumpulkan dana untuk kegiatan KB, terutama untuk pembayaran gaji guru dan pendamping. Selain sebagai ajang pengumpulan dana, pertemuan tersebut juga berfungsi sebagai wadah untuk menerima masukan, saran, kritik, serta evaluasi atau harapan dari para wali siswa terhadap KB Baital Hamdi Sampang.

Dari keterangan Risma Faraodiba dalam wawancara yang sama, penting untuk dicatat bahwa setiap wali kelas memiliki catatan keuangan kelas atau SPP masing-masing. Ketika para wali siswa membayar SPP, wali kelas mencatat penerimaan uang SPP tersebut pada catatan mereka masing-masing. Setelah itu, catatan tersebut bersama dengan uang yang terkumpul diserahkan kepada bendahara. Selanjutnya, koordinator guru merekap penerimaan SPP dari setiap kelas untuk kemudian diserahkan kepada bendahara KB Baital Hamdi Sampang.

Kemudian, bendahara KB Baital Hamdi Sampang mencatat pemasukan tersebut bersama dengan uang SPP, yang kemudian dikelola untuk pembayaran gaji guru dan pendamping. Saat guru dan pendamping menerima gaji, bendahara KB meminta mereka untuk menandatangani lembar penerimaan gaji sebagai bukti penerimaan. Hal ini juga memungkinkan para guru dan pendamping untuk saling mengetahui besaran atau jumlah gaji yang diterima oleh masing-masing, sehingga diharapkan tercipta transparansi dan keterbukaan di antara mereka.

Dalam wawancara yang sama, Novia menjelaskan bahwa pelaksanaan infak siswa memiliki teknis yang berbeda-beda tergantung pada otonomi masing-masing kelas. Setiap kelas memiliki pendekatan yang unik, yang biasanya ditentukan oleh

kebijakan wali kelas. Beberapa kelas melakukan penarikan infak pada awal pembelajaran, sebelum para santri menggunakan uangnya untuk membeli makanan. Para siswa menyisihkan uang mereka untuk infak dengan cara memasukkannya ke dalam wadah yang telah disiapkan, seperti kaleng infak. Di sisi lain, ada juga wali kelas yang melakukan penarikan infak siswa pada akhir pembelajaran, saat mereka akan pulang dan sedang berbaris untuk bersalaman. Pada saat itu, para siswa juga memasukkan uang infak mereka ke dalam wadah yang telah disiapkan.

Setelah semua uang infak terkumpul, setiap wali kelas melakukan perhitungan jumlahnya dan mencatatnya secara detail pada lembar infak yang dimiliki oleh masing-masing wali kelas. Setiap transaksi, baik pemasukan maupun pengeluaran uang infak, harus dicatat dengan teliti oleh setiap wali kelas. Catatan tersebut nantinya akan dilaporkan kepada pengurus pada pertemuan pengurus dan guru yang diselenggarakan setiap tanggal tiga setiap bulannya. Selain itu, catatan infak juga dilaporkan kepada wali murid pada pertemuan wali murid yang biasanya dilakukan setiap tanggal empat setiap bulannya. Dengan demikian, proses pelaporan yang teratur dan transparan mengenai infak siswa dapat terjaga dengan baik.

#### Bidang Membangun Jaringan

Kemitraan secara umum akan terjalin ketika ada kesadaran bahwa implementasi pembangunan akan mengalami kelemahan jika hanya menjadi fokus perhatian dari satu pihak saja.<sup>18</sup> Dengan kata lain, kemitraan sejatinya menjadi solusi yang tepat bagi pihak yang menginginkan percepatan progres pembangunan. Kemitraan merupakan model pengelolaan sumber daya yang efektif terutama ketika terkait dengan barang publik, seperti pemeliharaan dan pelestarian lingkungan, seperti program penanaman pohon. Baik masyarakat maupun pemerintah memiliki kepentingan dengan keberadaan program tersebut. Masyarakat di sekitar lahan yang ditanami pohon memiliki harapan besar terhadap manfaat ekonomi dan sosial yang dapat dihasilkan oleh pohon tersebut. Di sisi lain, pemerintah memiliki kepentingan yang signifikan terkait dengan penanaman kembali lahan kritis, tidak hanya dari segi ekonomi tetapi juga dari segi ekologi.

Pihak sekolah perlu memperhatikan peran masyarakat yang telah aktif terlibat dalam proses pendidikan dengan menggalang dan mendorong mereka untuk berperan lebih aktif dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Sejauh ini, sekolah sering kali hanya melibatkan masyarakat sebagai pelengkap, sehingga muncul persepsi bahwa pendidikan adalah tanggung jawab eksklusif pemerintah. Untuk

---

<sup>18</sup> Zahriani and Latif, "Peningkatan Kualitas Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di PAUD", *Indonesian Journal of Early Childhood: Jurnal Dunia Anak Usia Dini*, Vol 2, No. 1, (2020)

meningkatkan keterlibatan masyarakat, perlu diadakan aktivitas yang dapat merangsang partisipasi aktif warga dalam memajukan sekolah, dengan koordinasi dari komite sekolah.

Strategi yang diterapkan oleh sekolah untuk mengatasi masalah dana adalah dengan memperluas jaringan donatur. Salah satu program yang diterapkan oleh sekolah adalah program "donatur dua puluh ribu perbulan", yang bertujuan untuk mencapai berbagai lapisan masyarakat agar dapat menjadi donatur tetap bagi sekolah. Program ini terbukti efektif karena dana yang terkumpul dapat menutupi berbagai kebutuhan program di sekolah, sementara semakin banyaknya donatur juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perkembangan sekolah di masa mendatang. Biasanya, pengelolaan dana ini ditangani oleh bendahara sekolah dengan persetujuan dari kepala sekolah, dan hasilnya dilaporkan kepada yayasan, komite sekolah, serta pemerintah.

Selain itu, untuk mendapatkan dana dari yayasan, sekolah juga menyusun surat permohonan dana. Kelebihan dana di sekolah ini jarang terjadi karena pendanaan dari yayasan didasarkan pada kebutuhan langsung sekolah. Jika terdapat kekurangan dana, yayasan akan memberikan tambahan dana sesuai kebutuhan. Terdapat prosedur yang ditetapkan untuk pengajuan dana ke yayasan, terutama terkait dengan fasilitas dan infrastruktur sekolah. Penanggung jawab utama dalam hal ini adalah pihak yayasan, sementara kepala sekolah bertanggung jawab atas pemantauan dan pengawasan secara langsung.

Dalam kemitraan, penting bagi seluruh pihak untuk memperoleh apa yang menjadi kebutuhannya masing-masing. Sinergi antara berbagai elemen menjadi kunci dalam memainkan peran mereka dengan optimal. Fondasi dari kemitraan ini haruslah dibangun atas beberapa aspek penting, termasuk kesamaan perhatian atau kepentingan, adanya sikap saling mempercayai dan menghormati, tujuan yang jelas dan dapat diukur, serta kesediaan untuk berkorban, baik itu waktu, tenaga, maupun sumber daya lainnya. Prinsip-prinsip dasar kemitraan, pada dasarnya, mencakup kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Membangun kemitraan menjadi sangat penting untuk membuka pintu menuju kemandirian masyarakat, terutama dalam hal memasarkan hasil produksi mereka atau bermitra dalam program penanaman pohon. Selain itu, membangun kemitraan juga merupakan tanggung jawab seorang Fasilitator program penanaman pohon, selain dari tugas-tugas seperti komunikasi dialogis dan mengorganisir masyarakat.

Bidang usaha

Modal sosial sering kali belum mendapat perhatian yang seimbang, dibandingkan dengan unsur-unsur lain seperti sumber daya manusia, infrastruktur fisik, sumber daya alam, dan keuangan. Namun, dalam konteks sosiologi, modal sosial bukanlah konsep baru. Modal sosial merujuk pada serangkaian norma, kepercayaan, dan keterlibatan dalam jaringan sosial yang dapat mendukung kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan adil. Ini menciptakan landasan untuk kerjasama dan saling ketergantungan yang kuat dalam suatu masyarakat.

Modal sosial dapat dilihat dari tiga tingkatan yang saling terkait. Pertama adalah tingkatan nilai, di mana jaringan sosial dibentuk oleh kesamaan nilai, seperti agama, politik, atau keturunan. Kedua adalah tingkatan institusi, dimana jaringan sosial diorganisir menjadi institusi dengan perlakuan khusus terhadap individu yang memiliki nilai yang sama untuk memperoleh modal sosial. Ketiga adalah tingkatan mekanisme, dimana modal sosial tersebut menghasilkan kerjasama dan kolaborasi.

Kontribusi modal sosial juga bisa dilihat dari tiga jenjang yang saling terkait. Pertama adalah jenjang individu, di mana modal sosial berkontribusi dalam mendekati pengambil kebijakan dengan masyarakat, menggali aspirasi masyarakat, serta memberikan dukungan dan pendampingan. Kedua adalah jenjang komunitas, di mana modal sosial membantu dalam mempromosikan pengembangan institusi lokal, memperluas jaringan kerjasama antar komunitas, dan mengembangkan informasi bersama. Terakhir adalah jenjang nasional, di mana modal sosial turut berperan dalam pengembangan kebijakan partisipatif dan pelayanan masyarakat yang lebih luas.

Wujud nyata dari tipe modal sosial yang telah disebutkan meliputi beragam aspek, antara lain hubungan sosial yang kuat, adat dan nilai budaya lokal yang dijunjung tinggi, toleransi antarindividu dan kelompok, kesediaan untuk mendengarkan pandangan orang lain, praktik kejujuran dalam interaksi sosial, serta kearifan dan pengetahuan lokal yang dipertahankan dalam masyarakat. Selain itu, terdapat jaringan sosial yang solid dan kepemimpinan yang diakui oleh masyarakat, kepercayaan yang terbangun antara sesama anggota komunitas, serta rasa kebersamaan dan kesetiaan dalam menghadapi tantangan bersama.

Dalam konteks KB Baital Hamdi Sampang, berdasarkan pada gambaran tersebut, saat ini terlihat upaya untuk memanfaatkan modal sosial dalam mendukung pendidikan usia dini. Dengan minat belajar yang tinggi di kalangan anak-anak, KB Baital Hamdi Sampang mulai mengembangkan berbagai usaha terkait, seperti layanan pengajaran agama, warung kuliner, dan inisiatif lainnya, yang semuanya berpotensi untuk memperkuat kemitraan dan interaksi sosial dalam komunitas.

## Bidang Finansial

Perencanaan pembiayaan di sekolah ini dimulai dengan menyusun anggaran sekolah yang mencakup kebutuhan selama satu tahun mendatang. Proses penyusunan anggaran ini dilakukan oleh bendahara dan kepala sekolah dan diwujudkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Sumber dana untuk kegiatan sekolah ini berasal dari beberapa sumber, termasuk dana pemerintah (Bantuan Operasional Sekolah/BOS), sumbangan dari yayasan, dan sumbangan dari para donatur. Keseluruhan dana yang terkumpul kemudian dialokasikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan di sekolah ini, termasuk pemenuhan 8 standar pendidikan yang telah ditetapkan. Prioritas utama dalam alokasi dana tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para guru, mengingat peran sentral mereka dalam proses pendidikan.<sup>19</sup>

Pembiayaan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan identifikasi sumber-sumber dana, tetapi juga dengan pengelolaan dana secara efisien. Artinya, tujuan program pendidikan harus dicapai dengan menggunakan anggaran yang tersedia secara optimal. Mengingat pendidikan melibatkan banyak pihak dan memerlukan biaya yang besar, baik dalam hal jumlah siswa yang terlibat maupun dalam hal jumlah tenaga kerja yang diperlukan serta anggarannya, penting untuk memastikan penggunaan dana yang efisien. Pembiayaan pendidikan di sekolah harus memadai agar berbagai kegiatan pendidikan dapat berjalan lancar. Hal ini menekankan pentingnya distribusi manfaat pendidikan dan beban yang harus dipikul oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengelola pembiayaan pendidikan dengan baik agar memenuhi kebutuhan pendidikan di sekolah dan mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan.

Masalah yang sering muncul dalam pembiayaan adalah defisit karena pendapatan yang diterima oleh sekolah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Sekolah telah menggratiskan biaya masuk bagi peserta didiknya, sehingga pendapatan sekolah tidak berasal dari biaya pendidikan peserta didik. Untuk mengatasi masalah ini, sekolah mendapatkan dukungan dana dari pengurus yayasan. Dana ini bersifat pribadi dari masing-masing pengurus yayasan dan berasal dari penjualan batik. Sekolah ini memiliki strategi untuk meningkatkan pendapatan dengan program donatur dua puluh ribu. Secara rinci, setiap individu dapat menjadi donatur tetap dengan menyumbangkan dua puluh ribu rupiah setiap bulannya. Dana

---

<sup>19</sup> Ihsan El-Khuluqo, *Manajemen PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini): Pendidikan Taman Kehidupan Anak* (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 50.

yang terkumpul dicatat oleh bendahara sekolah dan dipublikasikan di website sekolah. Ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui proses menjadi donatur di sekolah dan memperoleh akses ke laporan langsung tentang program-program yang dijalankan oleh sekolah. Selanjutnya, laporan tersebut disusun sesuai dengan format yang ada. Setelah bendahara menyusun laporan, kepala sekolah memeriksa kembali keakuratan laporan tersebut.

Pelaporan keuangan di sekolah dikelola oleh bendahara yang mengumpulkan kwitansi-kwitansi dari setiap guru untuk pembelajaran yang mereka lakukan selama periode tertentu. Semua kwitansi tersebut akan dicatat dalam laporan keuangan setiap tiga bulan. Laporan pertanggungjawaban dana BOS akan diserahkan kepada pemerintah, sedangkan laporan keuangan lainnya akan disampaikan kepada yayasan dan para donatur, serta diarsipkan di sekolah sebagai bagian dari pemenuhan standar pembiayaan sekolah. Dalam proses penyusunan laporan keuangan ini, Pengelola KB akan mengumumkan kepada para guru yang memiliki bon atau nota pembayaran, kemudian bon tersebut dikumpulkan oleh bendahara sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, bendahara menyusun pengeluaran yang telah dicatat berdasarkan bon yang diserahkan oleh para guru dan program-program yang ada.

Adanya pelaksanaan finansial yang baik membawa beberapa manfaat, termasuk membantu dalam pengelolaan keuangan yang efektif dari seluruh sumber daya yang tersedia, sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan finansial yang telah ditetapkan. Disiplin finansial juga mendukung disiplin sosial secara optimal dalam menciptakan kondisi finansial yang sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, di KB Baital Hamdi Sampang, kami mengutamakan profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi dalam hal keuangan, hal ini bertujuan untuk membangun komunikasi yang baik dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

## **Kesimpulan**

Temuan dalam penelitian ini mengungkap bahwa pola partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di KB Baital Hamdi Sampang memiliki karakter fungsional religius kultural. Ini berarti partisipasi tersebut berasal dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat dalam pengembangan kegiatan pendidikan. Partisipasi ini tercermin dalam kegiatan-kegiatan yang telah menjadi bagian dari kebiasaan atau budaya masyarakat setempat.

KB Baital Hamdi Sampang menggunakan tokoh masyarakat untuk mempengaruhi agar masyarakat mau terlibat secara aktif. Upaya ini mencakup beberapa aspek, seperti: 1) Aspek Finansial: Mengenai biaya operasional KBM. 2) Aspek Jaringan: Membangun komunikasi yang bersahabat dan saling menguntungkan. 3) Aspek Usaha: Mencari solusi untuk mendapatkan dana demi meningkatkan kualitas KB.

Dalam konteks ini, KB Baital Hamdi Sampang secara aktif mencari strategi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek, baik finansial maupun melalui upaya memperluas jaringan komunikasi, serta berusaha mencari solusi kreatif untuk meningkatkan pendapatan demi meningkatkan kualitas pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di KB Baital Hamdi Sampang dilakukan dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan terkait penyusunan rencana anggaran belanja. Proses ini didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat, melalui tahapan analisis permasalahan, potensi, dan kepentingan masyarakat. Partisipasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk jenis pembiayaan capital cost dan recurrent cost. Wujud partisipasi ini tercermin dalam kehadiran masyarakat dalam pertemuan wali santri, rapat panitia pembangunan gedung KB, dan pertemuan-pertemuan lain yang diselenggarakan di wilayah KB Baital Hamdi Sampang.

### **Daftar Pustaka**

- Ahmad Sulaiman dan Udik Budi Widodo, Implementasi System Penjamin Mutu Internal Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Di Universitas Gadjah Mada, "Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan", Vol. 4, No. 1, (2016).
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV. Jejal, 2018).
- Anne Sarmono, Achmad Supriyanto, dan Agus Timan. Penerapan Manajemen Mutu Terpadu Pada Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Internal, "JAMP: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan", Vol. 3, No. 1, (2020).
- Arwildayanto, Nina Lamatenggo, and Warni Tune Sumar, Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan (Bandung: Widya Padjajaran, 2017).
- Bayu Suratman, Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan di PAUD IT Alhamdulillah Yogyakarta, "Atta'dib: Jurnal Pendidikan Agama Islam", Vol. 1, No. 1, (2020).

- E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep Upaya Dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).
- Ida Rindaningsih, *Pengembangan Model Manajemen Strategi Berbasis (Beyond Center And Circle Time) BCCT Pada PAUD*, "Pedagogia: Jurnal Pendidikan", Vol. 1, No. 2, (2012).
- Ihsan El-Khuluqo, *Manajemen PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini): Pendidikan Taman Kehidupan Anak* (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2015).
- Kholid Mawardi, *Insan Kamil Sebagai Basis Pengembangan Kreativitas Dalam Pendidikan Islam*, "Insania: Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan", Vol. 18, No. 1, (2013).
- M. Askari Zakariah, Vivi Afriani, and KH. M. Zakariah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Action Research, Research and Development (R and D)* (Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al- Mawaddah Warrahmah, 2020).
- Nelly Nelly, *Manajemen Finansial Lembaga Pendidikan Islam (Studi Tentang Optimalisasi Anggaran Pembiayaan)*, "Hikmah", Vol. 18, No. 1. (2021).
- Opan Arifudin et al., *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021).
- Rachmat Agumdhana dan Suwardji, "Faktor Sosial Ekonomi Masyarakat Dan Lingkungan Yang Berperan Dalam Agrowisata", "Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA", Vol. 5. No. 2, (2022).
- Rida Fironika, *Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia*, "Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar", Vol. 2. No, 1. (2015).
- Sonedi, Zulfa Jamalie, dan Majeri, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber Dari Masyarakat*, "Fenomena", Vol 9, No. 1, (2017).
- Suharni, *Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini Pada PAUD Bintang Rabbani Pekanbaru*, "Jurnal Ilmiah Potensia", Vol. 4, No. 1, (2019).
- Sunhaji, *The Impementation of Integrated Learning in The Islamic Religious Educationto Raise The Faith Devotion of The Students of State Seniour High Schools in Purwokerto*, "Dewantara", Vol. 1, No. 1, (2013).
- Trias Aprilyani dan Qosim Khoiri Anwar, *Manajemen Berbasis Masyarakat Dalam Pengelolaan PAUD*, "Journal of Nusantara Education". Vol. 1, No. 1, (2021).
- Zahriani and Latif, "Peningkatan Kualitas Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di PAUD", *Indonesian Journal of Early Childhood: Jurnal Dunia Anak Usia Dini*, Vol 2, No. 1, (2020)